

ABSTRAK

Salah satu permasalahan mendasar dalam pengelolaan pendidikan terletak pada distribusi guru. Dilema pengangkatan guru namun tidak menjamin pemerataan menjadi permasalahan tersendiri dalam kebijakan pendidikan di Indonesia. Di kabupaten Blitar terdapat kebijakan *Multigrade Teaching* sebagai solusi dari permasalahan pemerataan guru. Proses formulasinya memungkinkan terlibat banyak berbagai aktor sehingga mempengaruhi munculnya kebijakan susulan atas intervensi dan *lobbying* yang dilakukan oleh aktor kebijakan. Penelitian ini memiliki arti penting dalam mengidentifikasi aktor yang terlibat dalam formulasi kebijakan serta peranannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi aktor kebijakan dan menganalisis peran aktor dalam formulasi kebijakan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Strategi penelitian ini menggunakan study kasus yang berfokus pada formulasi kebijakan *Multigrade Teaching* di kabupaten Blitar. Teori yang menjadi pijakan dalam penelitian ini adalah Formulasi kebijakan, dan aktor kebijakan serta analisis peran kebijakan yang dipadukan dengan teori orientasi aktor dan *lobbying* dalam relasinya terhadap perumusan kebijakan. Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan adanya dominasi aktor resmi dan peran yang cukup kuat dari salah satu aktor rekanan dimana pola relasinya terjalin dengan *soft lobbying*. Peran masing-masing aktor yang terlibat dapat diseimbangkan oleh aktor kunci. Meski pasca proses penetapan kebijakan *lobbying* atas alternatif kebijakan yang dulunya sudah diajukan dan mendapat penolakan kemudian mampu menjadi kebijakan susulan yang mengikuti setelahnya.

Kata Kunci :Formulasi, Actor Kebijakan, *Multigrade Teaching*